

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

1. Keadaan Geografis

Provinsi Riau merupakan provinsi yang terletak dibagian tengah pantai timur Pulau Sumatra dengan titik koordinat 01° 05' 00" Lintang Selatan - 02° 25' 00" Lintang Utara atau antara 100° 00' 00" - 105° 05' 00" Bujur Timur. Sebelah utara Provinsi Riau berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatra Utara dan Selat Malaka, sebelah selatan di batasi oleh Provinsi Jambi dan Sumatra Barat, sebelah Barat berbatasan dengan Sumatra Utara dan Sumatra Utara dan pada bagian timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka.

Provinsi Riau terdiri dari 12 kabupaten/kota meliputi Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru. Ibukota kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Riau berjarak antara 48 km hingga 211 km dari ibukota provinsi dan berada pada ketinggian sekitar dua hingga 91 meter dari permukaan laut. Dalam daratan provinsi Riau mempunyai 15 sungai, akan tetapi hanya ada empat macam sungai besar yang mempunyai arti penting terhadap

sarana perhubungan seperti Sungai Siak (300km) dengan kedalaman 8 hingga 12 meter, Sungai Rokan (400km) dengan kedalaman 6 hingga 8 meter, Sungai Kampar (400km) dengan kedalaman lebih kurang 6 meter dan Sungai Indragiri (500km) dengan kedalaman 6 hingga 8 meter. Seluruh sungai besar ini membelah dari pegunungan daratan tinggi Bukit Barisan hingga bermuara di Selat Malaka dan laut Cina Selatan di pengaruhi pasang surut air laut

Secara keseluruhan wilayah Provinsi Riau terdiri dari pegunungan, dataran rendah, dan kepulauan. Daerah pegunungan terhampar dibagian barat, yaitu pegunungan bukit barisan. Semakin ke timur kontur tanah semakin menurun seperti dataran rendah. Di lepas pantai bagian timur, terdapat banyak pulau pulau, baik besar maupun kecil.



Gambar 4. 1 Peta Daerah Provinsi Riau

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat, bahwa wilayah Provinsi Riau diapit oleh dua kondisi alam, yaitu pegunungan bukit barisan dan selat malaka. Dengan posisi yang diapit seperti ini dapat memengaruhi iklim dan cuaca Provinsi Riau.

Iklim Provinsi Riau secara keseluruhan tropis basah yang di pengaruhi, oleh musim penghujan dan usim kemarau. Curah hujan Provinsi Riau rata rata antara 2.000-3.000 mm/ tahun dengan rata hujan pertahun sebanyak 160 hari. Daerah yang sering menerima hujan daerah Rokan dan Pekanbaru. Sementara itu daerah yang paling sedikit menerima hujan adalah daerah Siak.

Suhu udara rata-rata Provinsi Riau sebesar 25,9C dengan suhu maksimum 34,4C yang sering terjadi di daerah perkotaan di pesisir pantai dan suhu minimum 20,1C yang terjadi di wilayah gunung atau pegunungan yang tinggi. Kelembaban udara mencapai angka 75%. Berbeda jika wilayah di bagian timur di pengaruhi oleh iklim laut.

Pada tahun 2003 Provinsi Riau memiliki luas wilyah sebesar 329.867,61 Hektar (Ha) yang terdiri dari 235.306 Hektar lautan dan 94.561,61 Hektar daratan. Namun pada tahun 2002 Provinsi Riau dimekarkan menjadi dua Provinsi yaitu, Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau sehingga luas wilayah berkurang menjadi 107.932,71 Hektar meliputi 18.782,56 Hektar lautan dan 89.150,15 Hektar daratan. Secara administratif Provinsi Riau memiliki 12 kabupaten, 166 kecamatan dan 1.846 kelurahan.

2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Provinsi Riau yang telah dilakukan Sensus Penduduk tercatat sebanyak 6.657.911 pada tahun 2017 yang terdiri dari penduduk laki-laki 3.416.307 jiwa dan 3.241.604 jiwa penduduk perempuan, dengan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) sebesar 105 yang menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dari pada perempuan.

Distribusi kependudukan menurut kabupaten kota di Provinsi Riau masih terkonsentrasi di Kota Pekanbaru sebagai ibukota provinsi dari Provinsi Riau dengan jumlah penduduk 1.090.008 jiwa atau sebesar 16,39 persen dari seluruh jumlah penduduk yang ada. Sedangkan kabupaten yang memiliki jumlah penduduk yang kecil terdapat di kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 183.297 jiwa.

B. Perkembangan Variabel Penelitian

1. Perkembangan Belanja Modal di Provinsi Riau

Belanja modal dalam Anggaran Pemerintah dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu unsur belanja secara langsung. Dengan adanya otonomi daerah, daerah harus dapat mengembangkan daerahnya sendiri supaya apa yang diselenggarakan otonomi daerah dapat terlaksana. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan “ Belanja modal adalah pengeluaran suatu daerah yang dipergunakan untuk pembelian, pengadaan, atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang dipergunakan

dalam kegiatan pemerintah, dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya”.

Undang-undang memberikan penjelasan bahwasannya daerah memiliki hak kewenangan yang dapat menentukan alokasi sumber daya ke dalam pembelanjaan dengan menganut atau kepatutan, kebutuhan, dan kemampuan daerah. Pemerintah Daerah (Pemda) bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai badan legislatif dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman dalam pengelokasian sumber daya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Pelaksanaan anggaran, merupakan masalah yang paling banyak dihadapi oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dalam organisasi sektor publik. Pendapatan daerah tinggi, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan harus diimbangkan dengan Belanja Modal. Namun yang terjadi saat ini kurangnya terlaksana dengan baik dalam mengelokasikan belanja modal tersebut.

Tabel 4. 1 Belanja Modal Di Provinsi Riau Tahun 2013-2017

Tahun	Belanja Modal
2013	Rp 1.855.440.411.309
2014	Rp 1.730.358.806.017
2015	Rp 2.901.124.900.329
2016	Rp 2.532.123.773.745
2017	Rp 2.545.984.515.117

Sumber: *Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan*

Dari tabel 4.1 diatas merupakan Belanja Modal di Provinsi Riau yang mencakup 5 tahun terakhir terjadi fluktuasi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Dari 5 tahun terakhir belanja modal yang paling rendah berada di tahun 2014 yang mana hanya sebesar Rp. 1.730.358.806.017 sedangkan pada tahun 2013 belanja modalnya sebesar Rp. 1.855.440.411.309, jadi adanya pemangkasan belanja modal tahun 2014 sebesar Rp. 125.081.605.292. Belanja modal yang paling besar adalah ditahun 2015 sebesar Rp. 2.901.124.900.329 ada kenaikan sebesar 1.6% dari tahun sebelumnya. Tahun 2016 pun demikian terjadi penurunan belanja modal dari tahun 2015 sebesar Rp. 2.532.123.773.745 dan dan di tahun 2017 penerimaan belanja modal sebesar Rp. 2.545.984.515.117.

Tabel 4. 2 Belanja Modal Kab/Kota di Provinsi Riau Tahun 2015-2017 (Juta Rupiah)

Kabupate/Kota	Tahun		
	2015	2016	2017
Kab. Bengkalis	1.815.704	1.532.250	1.122.959
Kab. Indragiri Hilir	358.400	623.616	437.718
Kab. Indragiri Hulu	279.249	380.177	228.872
Kab. Kampar	490.401	506.002	239.187
Kab. Kuantan Singingi	326.736	268.292	203.274
Kab. Pelalawan	453.585	776.032	300.239
Kab. Rokan Hilir	465.847	931.668	237.781
Kab. Rokan Hulu	279.249	308.653	330.432
Kab. Siak	906.134	629.840	96.018
Kota Dumai	143.886	139.723	198.603
Kota Pekanbaru	821.627	1.038.506	599.953
Kab. Kepulauan Meranti	196.505	460.633	201.043

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK)

Tabel 4.2 merupakan 12 Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Riau dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 yang mana mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Dari seluruh Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Riau, Kabupaten Bengkalis yang paling banyak menerima belanja modal tahun 2013 sebesar 2.066.646 dan belanja modal sangat rendah Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 304.507. beda pada tahun 2015 yang paling besar belanja modalnya masih dari Kabupaten Bengkalis 1.815.704 dan yang paling rendah dari Kabupaten Indragiri Hulu. Pada tahun 2017 demikian Kabupaten Bengkalis masih memiliki belanja modal terbesar dari seluruh Kab/Kota di Provinsi Riau sebesar 1.122.959 dan yang terendah penerimaan belanja modalnya adalah Kabupaten Siak sebesar 96.018.

2. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Riau

Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambahan pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan dua pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran (BPS, 2018).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambahan yang berbentuk dari keseluruhan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah dengan rentang waktu tertentu. Data dalam penelitian ini disajikan dengan harga PDRB harga konstan 2010. Berdasarkan data PDRB atas harga konstan dapat dihitung pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan pertumbuhan riil kemampuan ekonomi suatu wilayah (BPS, 2015).

Salah satu syarat dalam kemajuan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dari besarnya PDRB suatu daerah dihasilkan dalam satu tahun dan dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi, dapat dikatakan PDRB adalah keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam waktu satu tahun di wilayah tersebut.

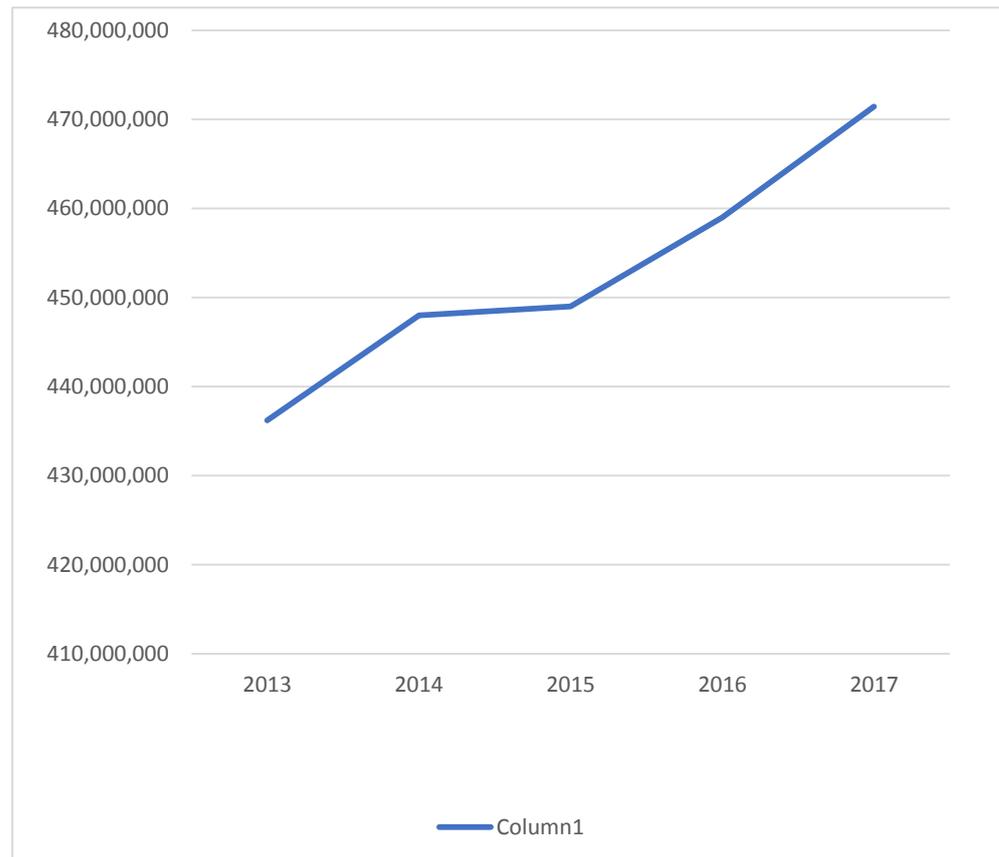
Tabel 4. 3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Provinsi Riau Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)

Tahun	Produk Domestik Regional Bruto
2013	436.188.000
2014	447.987.000
2015	448.992.000
2016	458.997.000
2017	471.420.000

Sumber: *Badan Pusat Statistik Riau, 2018*

Tabel 4.3 menjelaskan Produk Domestik Regional Bruto mengalami kenaikan yang sangat baik dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dimana pada awalnya tahun 2013 jumlah pendapatan dari PDRB sebesar 436.188.000. Pencapaian tertinggi PDRB Provinsi Riau

ialah tahun 2017 mencapai 471.420.000. Hal ini membuktikan perekonomian Provinsi Riau yang baik karena terus mengalami peningkatan.



4. 2 Produk Domestik Regional Bruto periode 2013-2017

**Tabel 4. 4 Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
Tahun 2013-2017 (Milyar Rupiah)**

Kategori PDRB	Tahun		
	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	108969.04	113287.59	119270.25
Pertambangan dan Penggalian	108549.18	103958.45	97348.95
Industri Pengolahan	126882.61	132525.10	139838.25
Pengadaan Listrik dan Gas	239.83	272.25	275.97
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	62.67	62.40	65.36
Konstruksi	34442.58	36137.43	38275.86
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	38816.69	40709.27	43302.34
Transportasi dan Pergudangan	3773.62	3889.19	4057.73
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2023.32	2087.36	2179.20
Informasi dan Komunikasi	3700.67	3883.71	4094.53
Jasa Keuangan dan Asuransi	4241.60	4481.27	4381
Real Estate	4026.52	4087.73	4223.51
Jasa Perusahaan	23.49	24.11	26.02
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8227.91	8203.39	8282.84
Jasa Pendidikan	2170.08	2184.91	2266.74
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	820.33	824.91	872.90
Jasa lainnya	2021.82	2150.28	2320.26

Sumber: *Badan Pusat Statistik Provinsi Riau*

Dari tabel 4.4 dapat dilihat bahwa perekonomian Provinsi Riau setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan, kecuali pada sektor industri pengolahan mengalami kenaikan dalam jangka waktu tiga tahun menjadikan sektor ini sebagai pemberi pengaruh terhadap perekonomian di Provinsi Riau, karena pertumbuhan ekonomi mencapai 139.838 milyar rupiah pada tahun 2017 yang mana pada

tahun 2015 Industri Pengolahan menyumbang sebesar 132.525 milyar rupiah yang mana merupakan angka terbesar dalam kurun waktu tiga tahun dengan tujuh belas sektor yang ada. Pemberi pengaruh kedua terbesar adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mana selama 3 tahun terakhir mengalami pertumbuhan signifikan dan pada tahun 2017 menyumbang sebesar 119.270 milyar rupiah. Dan diurutan yang ketiga adalah dari sektor pertambangan dan penggalian yang setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan, hingga tahun 2017 menyumbang sebesar 97.348 milyar rupiah. Hingga pemberian pengaruh yang paling sedikit adalah dari sektor jasa perusahaan yang setiap tahunnya mengalami peningkatan terus menerus dan pada tahun 2017 menyumbang sebesar 26 juta rupiah terhadap perekonomian Provinsi Riau.

3. Yang Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Riau

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari daerah itu sendiri dengan memanfaatkan potensi daerah yang ada sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari dana yang dipungut oleh pemerintah yaitu, pajak daerah, retribusi daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tinggi rendahnya Pendapatan Asli Daerah merupakan hal yang sangat penting karena dapat melihat seberapa besar kemandirian suatu daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

**Tabel 4. 5 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Di Provinsi Riau Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah
2013	2.687.869
2014	2.840.011
2015	3.656.361
2016	3.495.549
2017	3.735.800

Sumber: *Direktor Jendral Perimbangan Keuangan*

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 PAD sebesar 2.840.011 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun 2015 PAD mengalami kenaikan sebesar 3.656.361. Dan pada tahun 2016 PAD mengalami penurunan sebesar 160.812 menjadi 3.495.549. Peningkatan yang terus menerus hingga pada tahun 2017 PAD Provinsi Riau sebesar 3.735.800 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, angka ini tergolong angka yang sangat besar untuk suatu Provinsi. Peningkatan terus menerus PAD menandakan Provinsi tersebut mandiri dalam menganut keuangan suatu Provinsi.

**Tabel 4. 6 Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Riau
Menurut Jenis Penerimaan Tahun 2015-2017 (Juta Rupiah)**

Jenis Penerimaan	Tahun		
	2015	2016	2017
Penerimaan Asli Daerah	3.656.361	3.495.549	3.735.800
Pajak Daerah	2.924.923	2.765.549	3.000.000
Retribusi Daerah	24.369	11.000	14.000
Hasil Badan Usaha Milik Daerah	208.545	218.000	218.000
Lain-lainnya PAD yang sah	498.524	501.000	503.800

Sumber: *Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan*

Dari tabel 4.6 diatas dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau menyumbang terbesar dari pajak daerah yang mana tahun 2017 mencapai 3.000.000 juta rupiah. Diikuti lain-lainnya PAD yang sah sebanyak 503.800 juta rupiah. Setelah itu hasil Badan Usaha Milik Daerah menyumbang 218.000 juta rupiah. Dan penyumbang paling sedikit pada pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah yang hanya memberikan sebanyak 14.000 juta rupiah.

4. Perkembangan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) di Provinsi Riau

Selain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tranfer dari pemerintah pusat untuk membiayai kegiatan. Pemerintah daerah dapat menggunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. SiLPA adalah selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode yang mana nantinya anggaran tersebut bisa digunakan pada tahun berikutnya.

Jumlah SiLPA yang dapat dikatakan ideal perlu ditentukan sebagai salah satu dasar evaluasi terhadap pelaksana program atau kegiatan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pelampauan target SiLPA yang bersumber dari kesuksesan target pemerintah daerah dan efisien suatu anggaran sangatlah diharapkan kedepannya, sedangkan yang bersumber dari ketidak adanya program atau kegiatan pembangunan dalam jumlah tidak wajar yang mana dapat merugikan masyarakat

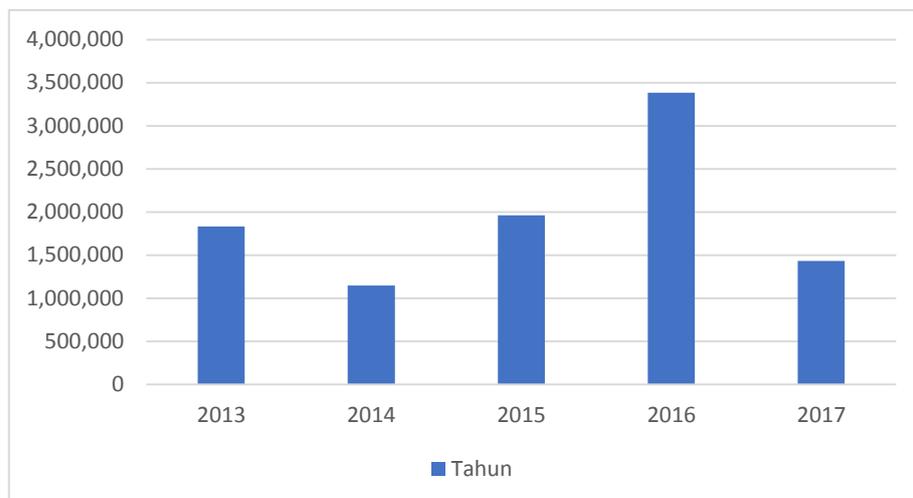
menegaskan bahwasannya SiLPA yang dihasilkan oleh APBD dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.

Sebagian besar SiLPA diperuntukkan ke Belanja Langsung yaitu belanja yang dilakukan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jumlah belanja langsung berupa pembangunan infrastruktur, pengadaan aset, dan sebagainya. Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan suatu daerah akan sarana dan prasarana, baik dari akses kemudahan dalam melaksanakan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan jasa pada tahun anggaran harus dianggarkan dalam APBD.

Tabel 4. 7 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Di Provinsi Riau Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)

Tahun	SiLPA
2013	1.834.864
2014	1.150.102
2015	1.962.400
2016	3.383.426
2017	1.434.458

Sumber: *Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan*



Gambar 4. 3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)Di Provinsi Riau Tahun 2013-2014

Pada tabel 4.7 menjelaskan bahwasannya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) mengalami fluktuasi setiap tahunnya dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Dimana pada tahun 2016 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran mengalami kenaikan yang sangat signifikan sebesar 3.383.426 juta rupiah, sedangkan tahun sebelumnya hanya sebesar 1.962.400. Dan ditahun setelahnya 2017 pendapatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran mengalami penurunan sebesar 1.948.968 yang mana hanya mendapatkan 1.434.458 juta rupiah. Dapat disimpulkan bahwasannya pada tahun 2016 di Provinsi Riau mengalami pengeluaran yang sangat besar besaran.

5. Perkembangan Jumlah Penduduk di Provinsi Riau

Tabel 4. 8 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2015-2017 (Jiwa)

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2015	2016	2017
Kab. Bengkalis	544783	549424	553734
Kab. Indragiri Hilir	704559	708547	712082
Kab. Indragiri Hulu	410152	416221	422095
Kab. Kampar	794596	809954	825056
Kab. Kuantan Singingi	314731	316514	318092
Kab. Pelalawan	398163	416550	435494
Kab. Rokan Hilir	646043	659992	673790
Kab. Rokan Hulu	593850	614839	636142
Kab. Siak Sri Indrapura	441766	451666	461480
Kota Dumai	286459	290705	294816
Kota Pekanbaru	1040174	1061000	1081518
Kab. Kepulauan Meranti	181446	182991	184426

Sumber: *Badan Pusat Statistik Provinsi Riau*

Jumlah penduduk adalah total manusia yang berada didalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama yang lain secara terus menerus atau kumpulan manusia yang menepati wilayah geografis dan ruang tertentu. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia menjelaskan bahwa penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Dalam penelitian ini menggunakan jumlah penduduk Provinsi Riau.

Berdasarkan data diatas tabel 4.8 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Provinsi Riau terus terjadi peningkatan setiap tahunnya. Jumlah penduduk terbanyak ditepati oleh Kota Pekanbaru pada tahun

2017, yaitu dengan jumlah penduduk 1.081.518 juta jiwa, jumlah penduduk di Kota Pekanbaru ini selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya merupakan ibu kota dari Provinsi Riau. Jumlah penduduk terbesar nomor dua dipegang oleh Kabupaten Kampar sebesar 825.056 jiwa yang mana setiap tahunnya juga mengalami kenaikan pertumbuhan. Dan jumlah penduduk terbesar ketiga dipegang oleh Kabupaten Indragiri Hilir dengan jumlah penduduknya sebesar 712.082 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terkecil pada tahun 2017 adalah dari Kota Dumai dengan jumlah penduduknya sebesar 294.816.